



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 telah selesai disusun sebagaimana berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka disusun Perubahan Renja SKPD Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam 1 (satu) tahun.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

Majilis, 02 Juni 2025
KEPALA DPMD
HALSEN, S.IP, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19720424 199203 1 004



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	10
BAB IV PENUTUP	16

DAFTAR TABEL

- Tabel E-81 : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
- Tabel 2. : Kebijakan Umum Anggaran Perubahan TA. 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Tabel 3. : Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Antara Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (common, goals) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana kerja Pemerintah daerah;
 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur;
14. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor 18).

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur menyusun Perubahan Renja SKPD Tahun 2025 dengan melaksanakan tugas dan fungsi untuk periode 1 (satu) tahun, sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas dan pedoman pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta menyesuaikan dengan kebijakan anggaran

terkait dinamika permasalahan yang timbul dimasyarakat dan melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Capaian Kinerja
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KAB. LUWU TIMUR
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah ihtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur.

Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value For Money*. Penggunaan konsep tersebut menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya yang digunakan, seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material dan masukan lainnya dalam melakukan suatu kegiatan.
- b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
- c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II Tahun 2025 Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur di sajikan pada Tabel E-81 (Lampiran). Berdasarkan Tabel E-81, capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai pada Triwulan II ,masih jauh dari harapan. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rata-ratanya mencapai 43,61%.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 hingga triwulan II antara lain :

1. Kemampuan ASN yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang masih belum merata;
2. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Papan Nama Instansi/Signage masih menunggu proses penawaran ke pihak ketiga;
3. Belanja Modal Alat Pembersih Lainnya masih menunggu proses penawaran ke pihak ketiga melalui belanja e-purchasing berupa 1 unit Alat Semprot Rumput;
4. Pengajuan pada Inaproch (belanja e-Katalog) yang masih terkendala sehingga proses pencairan yang masih terhambat yang pada akhirnya mempengaruhi capaian kinerja dan keuangan;
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang direncanakan sebanyak 25 desa di Kabupaten Luwu Timur tidak dapat dilaksanakan karena Pilkades Tahun 2025 ditunda pelaksanaannya dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut diatur perubahan atau perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, dengan begitu Kepala Desa yang semula jabatannya 6 tahun ditambah menjadi 8 tahun.

6. Kebijakan pemerintah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja sehingga memerlukan penyesuaian atau rasionalisasi seperti belanja ATK, Belanja Bahan Kertas dan Cover, Belanja Bahan Komputer, Belanja Makan Minum Tamu, Belanja Perjalanan Dinas.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 Nomor DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 02 Januari 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.985.893.199,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|-------------------------------------|----------------------|
| a. | Belanja Operasi | Rp. 8.926.893.199,00 |
| | - Belanja Pegawai | Rp. 2.602.681.184,00 |
| | - Belanja Barang dan Jasa | Rp. 6.324.212.015,00 |
| b. | Belanja Modal | Rp. 59.000.000,00 |
| | - Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 59.000.000,00 |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.985.893.199,00 dan pada rencana perubahan Tahun 2025 akan mengalami pengurangan pagu indikatif menjadi Rp. 5.741.112.449,00 yang dilakoasikan pada 4 Program, 11 Kegiatan dan 37 Sub kegiatan, dimana pada perubahan anggaran terdapat 31 sub kegiatan mengalami pengurangan pagu indikatif, sebanyak 7 sub kegiatan tidak mengalami perubahan anggaran, dan 1 sub kegiatan dihapus.

Perubahan anggaran disebabkan karena adanya pengurangan target kinerja dan penambahan sub belanja dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif disajikan pada tabel lampiran.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat dan desa perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan desa yang tumpang tindih.

Sesuai visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**. Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjejaring luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi pemberdayaan Masyarakat dan desa diharapkan mendukung visi misi Kepala Daerah.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tujuannya adalah **"Meningkatnya Kemandirian Pembangunan Desa"**. Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian ditetapkan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Adapun program-program yang diusulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur pada tahun anggaran 2025 ada 4 (empat) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

b. Kegiatan

Kegiatan adalah aktivitas, usaha atau pekerjaan. Suatu peristiwa atau kejadian yang pada umumnya tidak dilakukan secara terus menerus. Pada Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur melaksanakan 11 kegiatan, 7 kegiatan non urusan dan 3 kegiatan teknis, yaitu :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Penyelenggaraan Penataan Desa;
10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan dilakukan untuk merealisasikan program dan kegiatan dan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Pada Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur merencanakan anggaran perubahan sebesar Rp 7.461.972.211,00 yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi	Rp. 5.864.315.361,00
b. Belanja Modal	Rp. 1.152.656.850,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 0,00
d. Belanja Transfer	Rp.0,00

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk melaksanakan 4 program, 11 kegiatan dan 38 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
8. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
9. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
10. Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor;
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

14. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan;
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
16. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
19. Penyediaan Jasa Surat menyurat;
20. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
21. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
22. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
24. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
25. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa;
26. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
27. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
28. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
29. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
30. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
31. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa;
32. Fasilitasi Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat Desa;
33. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;
34. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
35. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum

Adat;

36. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
37. Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
38. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025 dan perubahan pagu indikatif disajikan pada lampiran.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur.

Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program teknis dan sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Alokasi anggaran indikatif pada Tahun 2025 yang diperuntukkan untuk membiayai seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dikelompokkan dalam **Belanja Operasi** yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. Sementara **Belanja Modal** yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin. Tahun 2025 Pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 8.985.893.199,00 dan diperubahan sebesar Rp. 5.741.122.4449,00

Sebagai input bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran pemerintah daerah bahwa dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah, masing-masing pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mendapat alokasi anggaran untuk peningkatan pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

TABEL E-81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP KABUPATEN/KOTA RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATE LUWU TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN
TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Di Evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2025			
							I		II		III		IV			13 = 9+10+11+12		14=13/8x100%	
1	2	3	4	5	8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14=13/8x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	% 3,718,650,234	46,756	571,309,753		1,380,259,626					46,756	1,951,569,379	72.79%	52.48%	
1			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu	100	% 82,647,300	200	3,500,000		10,850,000					11	14,350,000	310.00%	17.36%	

			Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	41,476,550	3	3,500,000	8,750,000				3	12,250,000	150.00%	29.53%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dok	2,594,650	-	-	-				-	-	0.00%	0.00%
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dok	3,176,400	1	-	1	-			2	-	100.00%	0.00%

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	10	Dok	35,399,700	4	-	2	2,100,000				6	2,100,000	60.00%	5.93%
							82,647,300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							104.82%	17.36%		
								Predikat Kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
2			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	100	%	2,651,155,184	1,050	552,409,753		1,190,458,497				263	1,742,868,250	1.00	65.74%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	Org	2,602,682,184	17	546,709,753	17	1,176,208,497				9	1,722,918,250	50.00%	66.20%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	18	Dok	48,473,000	4	5,700,000	5	14,250,000				9	19,950,000	50.00%	41.16%
							2,651,155,184	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							50.00%	65.74%		
								Predikat Kinerja							Sangat Rendah	Sedang		

3			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100	%	31,307,000	100	1,900,000	6,790,000				25	8,690,000	50.00%	27.76%
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	31,307,000	1	1,900,000	1	6,790,000			2	8,690,000	50.00%	27.76%
							31,307,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						50.00%	27.76%		
								Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	71,242,950	500	-	9,200,000				125	9,200,000	72.92%	12.91%
			Pendataan dan Pegolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Laporan	8,608,750	5	-	-				5	-	41.67%	0.00%
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16	Org	62,634,200	5	-	9,200,000				5	9,200,000	31.25%	14.69%
							71,242,950	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.00%		
								Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	238,333,800	857	3,000,000	75,043,626				214	78,043,626	669.09%	32.75%

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2,540,000	2	-	2	587,400				4	587,400	200.00%	23.13%
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1,770,000	1	-	1	-				2	-	0.00%	0.00%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	3	Paket	10,404,200	2	-	2	5,049,000				4	5,049,000	133.33%	48.53%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	6,295,000	2	-	2	1,340,000				1	1,340,000	50.00%	21.29%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	Dokumen	14,100,000	3	-	3	5,835,000				6	5,835,000	200.00%	41.38%
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11	Laporan	19,400,000	2	-	3	6,480,000				5	6,480,000	45.45%	33.40%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196	Laporan	183,824,600	48	3,000,000	31	55,752,226				79	58,752,226	40.31%	31.96%
							238,333,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								55.89%	32.75%	
								Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah	
6			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100	%	59,000,000	-	-	-	-				-	-	0.00%	0.00%

			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3	Unit	59,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
							59,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0.00%	0.00%		
								Predikat Kinerja							Sangat Rendah	Sangat Rendah		
7			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa	100	%	161,154,000	600	10,500,000		59,450,389				150	69,950,389	137.50%	43.41%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3,930,000	3	-	3	200,000				6	200,000	50.00%	5.09%
			Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	94,224,000	12	-	12	33,000,389				24	33,000,389	50.00%	35.02%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	63,000,000	3	10,500,000	3	26,250,000				2	36,750,000	37.50%	58.33%
							161,154,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							45.11%	43.41%		
								Predikat Kinerja							Sangat Rendah	Sangat Rendah		
8			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	%	423,810,000	433	-		28,467,114				108	28,467,114	116.37%	6.72%

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16	Unit	147,550,000	11	-	-	10,687,114				11	10,687,114	68.75%	7.24%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	42	Unit	25,260,000	1	-	5	1,880,000				6	1,880,000	14.29%	7.44%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3	Unit	251,000,000	1	-	-	15,900,000				1	15,900,000	33.33%	6.33%
							423,810,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							44.53%	6.72%		
								Predikat Kinerja							Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Perse ntase menin gkatn ya desa mandiri	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	80	%	26,602,050	-	-		8,586,066				-	8,586,066	0.00%	32.28%
			Kegiatan Penyelenggaraa n Penataan Desa	Persentase peningkatan penataan desa	100	%	26,602,050	-	-		8,586,066				-	8,586,066	0.00%	32.28%

			Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	1	Desa	26,602,050	-	-	8,586,066	-	8,586,066	0.00%	32.28%
							26,602,050	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0.00%	32.28%	
								Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa	80	%	573,995,175	11,111	8,000,000	97,840,848	11,111	105,840,848	26.67%	18.44%
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	100	%	573,995,175	111	8,000,000	97,840,848	111	105,840,848	26.67%	18.44%
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2	Dokumen	9,549,500	1	-	4,320,000	2	4,320,000	100.00%	45.24%

	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5	Dokumen	351,964,250	-	2,000,000	1	57,420,848		1	59,420,848	20.00%	16.88%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	125	Dokumen	23,860,610	-	-	-	-		-	-	0.00%	0.00%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	125	Dokumen	45,638,225	-	-	-	14,520,000		-	14,520,000	0.00%	31.82%

	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	125	Dokumen	13,094,410	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	67	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0.00%	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15	Laporan	35,352,580	9	4,000,000	9	16,580,000				18	20,580,000	120%	58.21%

			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	11	Dokumen	60,038,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124	Org	34,496,750	-	2,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	7,000,000	0.00%	20.29%
							573,995,175	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							21.32%	18.44%		
								Predikat Kinerja							Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa	75	%	774,864,990	10,000	9,000,000	-	75,433,867	-	-	-	10,000	84,433,867	13333.33%	10.90%

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	100 %	774,864,990	100	9,000,000	-	75,433,867	-	-	100	84,433,867	100.00%	10.90%
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	254 Dokumen	161,860,500	-	-	-	32,460,000	-	-	-	32,460,000	0.00%	20.05%

			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2	Dokumen	71,609,650	1	4,000,000	-	19,580,000			1	23,580,000	50.00%	32.93%
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11	Laporan	59,799,540	-	-	-	-			-	-	0.00%	0.00%
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12	Dokumen	481,595,300	3	5,000,000	3	23,393,867			6	28,393,867	50.00%	5.90%
							774,864,990								35.70%	10.90%	
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
							5,094,112,449	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						43.61%	42.03%		
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Penanggungjawab
							I		II		III		IV		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	%	4,616,968,611	17	462,115,015	13	1,074,755,072				Sekretaris
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu	100	%	89,935,360	25	4,590,000	25	17,882,495				Sekretaris
			Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	42,299,735	2	2,000,000	-	8,770,450				Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dok	3,522,650	-	-	-	1,319,020				Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dok	3,654,000	1	-	1	1,509,640				Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	10	Dok	40,458,975	4	2,590,000	2	6,283,385				Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	%	2,668,883,589	48	355,349,302	48	852,193,806				Sekretaris
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Org	2,610,046,589	17	350,180,802	17	831,764,306				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18	Dok	58,837,000	4	5,168,500	4	20,429,500				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100	%	16,182,800	25	-		5,916,500				

			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Dok	16,182,800	1	-	1	5,916,500				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	86,781,950	15	2,020,000		15,979,570				Sekretaris
			Pendataan dan Pegolahan Administasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dok	14,999,950	4	-	2	1,626,570				Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5	Org	12,550,000	-	-	2	5,810,000				Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Org	59,232,000	1	2,020,000	3	8,543,000				Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	400,661,000	15	53,638,750	18	139,361,530								Sekretaris	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	2,535,800	-	-	6	637,400									Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	2,100,000	-	-	3	1,285,000									Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	29	Paket	10,411,600	8	-	29	3,675,800									Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	7,015,000	4	300,000	4	3,112,300									Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	132 Dokumen	12,780,000	33	1,990,000	33	3,115,000				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 Laporan	24,840,000	-	-	3	1,440,000				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283 Laporan	340,978,600	57	51,348,750	46	126,096,030				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD	100 %	1,031,535,912	-	-		1,600,000				
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	71,810,912	-	-	-	1,600,000				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	10,000,000	-	-	-	-				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	949,725,000	-	-	-	-				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa	100 %	162,078,000	5	27,488,963	6	33,056,171				Sekretaris
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,854,000	-	-	3	2,054,010				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	94,224,000	12	16,988,963	12	15,252,161				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	63,000,000	4	10,500,000	4	15,750,000				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	160,910,000	7	19,028,000	4	8,765,000		-	-	Sekretaris
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	84,650,000	11	7,528,000	11	7,215,000				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	25,260,000	8	1,500,000	1	1,550,000				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	3 Unit	51,000,000	1	10,000,000	1	-				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

2	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase meningkatnya desa mandiri	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	80 %	42,717,446	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa
			Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase peningkatan penataan desa	100 %	42,717,446	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa
			Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	1 Desa	42,717,446	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa	100 %	714,307,684	23	18,710,500	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	80 %	714,307,684	23	18,710,500	-	34,955,000	-	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	10,654,300	-	-	1	-	-	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5	Dokumen	99,024,272	3	12,710,500	-	6,820,000	-				Kepala Bidang Penataan Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	125	Dokumen	34,267,536	-	-	-	-	-				Kepala Bidang Penataan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	125	Dokumen	68,205,429	-	-	-	15,125,000	-				Kepala Bidang Penataan Desa
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasiats	124	Org	170,629,950	-	-	-	-	-				Kepala Bidang SDM dan SDA
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	125	Dokumen	23,735,193	-	-	125	-	-				Kepala Bidang Penataan Desa
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15	Laporan	44,080,936	3	4,000,000	5	8,010,000	-				Kepala Bidang Penataan Desa

		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	11 Dokumen	124,999,788	-	-	-	-				Kepala Bidang Penataan Desa
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124 Org	138,710,280	-	2,000,000	-	5,000,000				Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa	100 %	1,312,308,470	13	11,000,000	-	301,739,750	-	-	-	Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	75 %	1,312,308,470	13	11,000,000	-	301,739,750	-	-	-	Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	254 Dokumen	171,360,750	-	-	-	32,420,000				Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	113,380,900	1	4,000,000	-	11,000,000				Kepala Bidang SDM dan SDA
		Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11 Laporan	115,249,000	-	-	-	-				Kepala Bidang SDM dan SDA
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	912,317,820	3	7,000,000	3	258,319,750				Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		TARGET		PAGU INDIKATIF		ORGANISASI
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar			4.616.968.611,00	4.710.216.971	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu			89.935.360,00	125.235.360	
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	42.299.800,00	42.299.735,00	DPMD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.522.750,00	3.522.650,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3 Dokumen	3.654.000,00	3.654.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	40.459.100,00	75.758.975,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik			2.668.883.589,00	2.404.648.611,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	17 Orang	2.610.046.589,00	2.328.891.611,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18 Dokumen	18 Dokumen	58.837.000,00	75.757.000,00	
--	--	---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	--

	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar			16.182.800,00	24.042.800,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	4 dokumen	16.184.300,00	24.042.800,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			86.781.950,00	131.941.950,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	14.999.950,00	14.999.950,00	DPMD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	5 Orang	12.550.000,00	12.550.000,00	DPMD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	10 Orang	59.232.000,00	104.392.000,00	DPMD
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah			400.661.000,00	605.027.400,00	

	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	2.535.800,00	2.535.800,00	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	2.100.000,00	2.100.000,00	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	29 Paket	28 Paket	10.411.600,00	11.801.600,00	
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	7.015.600,00	9.735.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	132 Dokumen	132 Dokumen	12.780.000,00	14.100.000,00	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	33 Orang	11 Laporan	24.840.000,00	24.840.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	283 Laporan	256 Laporan	340.978.600,00	539.915.000,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi			1.031.535.912,00	1.127.056.850,00	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	6 unit	71.810.912,00	22.900.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	9 Unit	10.000.000,00	154.431.850,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	949.725.000,00	949.725.000,00	

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa			162.078.000,00	144.654.000,000	
--	--	---	---	--	--	----------------	-----------------	--

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Lapoarn	4.856.000,00	4.856.000,00	
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	94.224.000,00	76.800.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	63.000.000,00	63.000.000,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			160.910.000,00	147.610.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	16 Unit	84.650.000,00	84.650.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	30 Unit	25.260.000,00	18.960.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	3 Unit	3 Unit	51.000.000,00	44.000.000,00	
	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya			42.717.446,00	28.557.446	
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase peningkatan penataan desa	Persentase peningkatan penataan desa			42.717.446,00	28.557.446	
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Jumlah Desa yang Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	1 Desa	1 Desa	42.717.446,00	28.557.446	

	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa			714.307.684,00	834.726.324,00	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Persentase Desa yang Tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa			714.307.684,00	834.726.324,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	10.654.300,00	104.024.300,00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	99.024.272,00	99.024.272,00	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	125 Dokumen	125 Dokumen	34.267.536,00	34.267.536,00	

	Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa	125 Dokumen	125 Dokumen	68.205.429,00	117.805.429,00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124 Orang	124 Orang	170.629.950,00	170.629.950,00	
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	125 Dokumen	125 Dokumen	23.735.193,00	16.435.193,00	
	Fasiltasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasiltasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasiltasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15 Laporan	20 Laporan	44.080.936,00	52.530.936,00	
	Fasiltasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	11 Dokumen	1 Dokumen	124.999.788,00	101.299.788,00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124 orang	124 orang	138.710.920,00	138.708.920,00	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa	Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa				1.443.471.470,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna				1.443.471.470,00	

	Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	254 Dokumen	4 Dokumen	171.360.750,00	171.360.750,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	113.380.900,00	113.380.900,00	
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11 Laporan	1 Laporan	115.249.000,00	34.309.000,00	

	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	12 Dokumen	912.317.820,00	65.210.000,00	
JUMLAH						6.686.302.211,00	7.016.972.211,00	

**ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
ANTARA SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN
TAHUN 2024**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Renja		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
			Pokok	Perubahan	Rp	%	
(1)	(2)	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	BELANJA		6,461,302,211	7,016,972,211	555,670,000	8.60	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	4,616,968,611	4,710,216,971	93,248,360	2.02	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu	89,935,360	125,235,360	35,300,000	39.25	
1)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	42,299,735	42,299,735	0	0.00	
2)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,522,650	3,522,650	0	0.00	
3)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3,654,000	3,654,000	0	0.00	
4)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	40,458,975	75,758,975	35,300,000	87.25	Penambahan Anggaran (dari Pergeseran) untuk kegiatan Studi Tiru/Coaching Clinic Perencanaan

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	2,668,883,589	2,404,648,611	(264,234,978)	(9.90)	
5)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,610,046,589	2,328,891,611	(281,154,978)	(10.77)	Mengalami penurunan anggaran disesuaikan dengan pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai DPMD (15 PNS & 2 PPPK)
6)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	58,837,000	75,757,000	16,920,000	28.76	Penambahan Anggaran (dari Pergeseran) untuk kegiatan Studi Tiru Bendahara Barang
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	16,182,800	24,042,800	7,860,000	48.57	
7)	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16,182,800	24,042,800	7,860,000	48.57	Penambahan Anggaran untuk kegiatan penatausahaan Barang Milik Daerah yang akan dikoordinasikan ke Luar Daerah Dalam Propinsi (dari Pergeseran)
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86,781,950	131,941,950	45,160,000	52.04	
8)	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14,999,950	14,999,950	0	0.00	
9)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	12,550,000	12,550,000	0	0.00	

10)	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	59,232,000	104,392,000	45,160,000	76.24	Penambahan Anggaran (dari Pergeseran) untuk Bimtek salah satunya yaitu Bimtek Renstra , Bimtek Kepegawaian dan Bimtek penyelenggaraan hukum administrasi pemerintahan.
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	400,661,000	605,027,400	204,366,400	51.01	
11)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2,535,800	2,535,800	0	0.00	
12)	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2,100,000	2,100,000	0	0.00	
13)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	10,411,600	11,801,600	1,390,000	13.35	Penambahan Anggaran sesuai kebutuhan kantor (dari Pergeseran)
14)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7,015,000	9,735,000	2,720,000	38.77	Penambahan Anggaran sesuai kebutuhan kantor (dari Pergeseran)
15)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,780,000	14,100,000	1,320,000	10.33	Penambahan Anggaran sesuai kebutuhan kantor (dari Pergeseran)
16)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24,840,000	24,840,000	0	0.00	
17)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340,978,600	539,915,000	198,936,400	58.34	Penambahan Anggaran Perjalanan Dinas Luar Dalam Daerah untuk melakukan koordinasi dan konsultasi (pergeseran dari anggaran Gaji)

6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	1,031,535,912	1,127,056,850	144,431,850	9.26	
18)	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	71,810,912	22,900,000	(48,910,912)	(68.11)	
19)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10,000,000	154,431,850	144,431,850	1,444.32	Penambahan Anggaran untuk belanja Ipad Samsung 3 Unit, Drone 1 unit, PC 2 Unit dan Scanner 1 unit (pergeseran)
20)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	949,725,000	949,725,000	0	0.00	
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa	162,078,000	144,654,000	(17,424,000)	(10.75)	
21)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,854,000	4,854,000	0	0.00	
22)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik yang Disediakan	94,224,000	76,800,000	(17,424,000)	(18.49)	
23)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	63,000,000	63,000,000	0	0.00	
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	160,910,000	147,610,000	(13,300,000)	(8.27)	
24)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	84,650,000	84,650,000	0	0.00	
25)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	25,260,000	18,960,000	(6,300,000)	(24.94)	
26)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	51,000,000	44,000,000	(7,000,000)	(13.73)	

II	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	42,717,446	28,557,446	(14,160,000)	(33.15)	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase peningkatan penataan desa	42,717,446	28,557,446	(14,160,000)	(33.15)	
27)	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	42,717,446	28,557,446	(14,160,000)	(33.15)	Penambahan Anggaran (dari Pergeseran) untuk melakukan koordinasi terkait dengan tindaklanjut hasil verifikasi data pendukung Pemekaran desa ke DPMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Dalam Negeri
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa	714,307,684	834,726,324	120,418,640	16.86	
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	714,307,684	834,726,324	120,418,640	16.86	
28)	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10,654,300	104,024,300	93,370,000	876.36	Penambahan Anggaran (dari Pergeseran) untuk melakukan koordinasi terkait dengan kegiatan Penguatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan BPD sesuai dengan amanat UUD Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UDD Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

29)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	99,024,272	99,024,272	0	0.00	
30)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	34,267,536	34,267,536	0	0.00	
31)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	68,205,429	117,805,429	49,600,000	72.72	Penambahan Anggaran (dari Pergeseran) untuk kegiatan monitoring penyusunan LPPD
32)	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	170,629,950	170,629,950	0	0.00	
33)	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	23,735,193	16,435,193	(7,300,000)	(30.76)	
34)	Fasilitasi Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	44,080,936	52,530,936	8,450,000	19.17	
35)	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	124,999,788	101,299,788	(23,700,000)	(18.96)	Mengalami penurunan anggaran dikarenakan anggaran dipersiapkan lomba desa tingkat Provinsi, namun desa matano yang mewakili Kabupaten Luwu Timur tidak mendapat juara, sehingga pagu digeser ke subkegiatan pengangkatan & pemberhentian perangkat desa sebesar Rp. 1.150.000,- dan subkegiatan pengadaan peralatan & mesin lainnya Rp. 22.550.000,-
36)	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	138,710,280	138,708,920	(1,360)	(0.00)	

IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa	1,087,308,470	1,443,471,470	356,163,000	32.76	
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	1,087,308,470	1,443,471,470	356,163,000	32.76	
37)	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	171,360,750	171,360,750	0	0.00	
38)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	113,380,900	113,380,900	0	0.00	
39)	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	115,249,000	34,309,000	(80,940,000)	(70.23)	dialihkan ke subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40)	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	687,317,820	1,124,420,820	437,103,000	63.60	penambahan anggaran kegiatan Jambore PKK di Solo dan BKK stunting dari provinsi

TABEL E-81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT
DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA RENJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPAT
EN LUWU
TIMUR
PERIODE
PELAKSANAAN TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Penanggungjawab	
							I		II		III		IV			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	%	4,616,968,611	17	462,115,015	13	1,074,755,072					Sekretaris
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu	100	%	89,935,360	25	4,590,000	25	17,882,495					Sekretaris

			Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	42,299,735	2	2,000,000	-	8,770,450					Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dok	3,522,650	-	-	-	1,319,020					Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dok	3,654,000	1	-	1	1,509,640					Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	10	Dok	40,458,975	4	2,590,000	2	6,283,385					Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	%	2,668,883,589	48	355,349,302	48	852,193,806					Sekretaris
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Org	2,610,046,589	17	350,180,802	17	831,764,306					Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	18	Dok	58,837,000	4	5,168,500	4	20,429,500					Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100	%	16,182,800	25	-		5,916,500					
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Dok	16,182,800	1	-	1	5,916,500					Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	86,781,950	15	2,020,000		15,979,570					Sekretaris
			Pendataan dan Pegolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dok	14,999,950	4	-	2	1,626,570					Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5	Org	12,550,000	-	-	2	5,810,000					Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Org	59,232,000	1	2,020,000	3	8,543,000					Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	400,661,000	15	53,638,750	18	139,361,530					Sekretaris
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	2,535,800	-	-	6	637,400					Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2,100,000	-	-	3	1,285,000				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	29 Paket	10,411,600	8	-	29	3,675,800				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7,015,000	4	300,000	4	3,112,300				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	132 Dokumen	12,780,000	33	1,990,000	33	3,115,000				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 Laporan	24,840,000	-	-	3	1,440,000				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283 Laporan	340,978,600	57	51,348,750	46	126,096,030				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD	100 %	1,031,535,912	-	-		1,600,000				
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	71,810,912	-	-	-	1,600,000				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	-	-	-	-				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	949,725,000	-	-	-	-				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16	Unit	84,650,000	11	7,528,000	11	7,215,000							Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	42	Unit	25,260,000	8	1,500,000	1	1,550,000							Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	3	Unit	51,000,000	1	10,000,000	1	-							Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
2	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase meningkatnya desa mandiri	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	80	%	42,717,446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa
			Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase peningkatan penataan desa	100	%	42,717,446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa
			Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	1	Desa	42,717,446	-	-	-	-							Kepala Bidang Penataan Desa

		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa	100 %	714,307,684	23	18,710,500	-	-	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	80 %	714,307,684	23	18,710,500	-	34,955,000	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	10,654,300	-	-	1	-	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen	99,024,272	3	12,710,500	-	6,820,000	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	125 Dokumen	34,267,536	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	125 Dokumen	68,205,429	-	-	-	15,125,000	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa

		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasiats	124	Org	170,629,950	-	-	-	-					Kepala Bidang SDM dan SDA
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	125	Dokumen	23,735,193	-	-	125	-					Kepala Bidang Penataan Desa
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15	Laporan	44,080,936	3	4,000,000	5	8,010,000					Kepala Bidang Penataan Desa
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	11	Dokumen	124,999,788	-	-	-	-					Kepala Bidang Penataan Desa
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124	Org	138,710,280	-	2,000,000	-	5,000,000					Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa	100	%	1,312,308,470	13	11,000,000	-	301,739,750	-	-	-	-	Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

